

| JADWAL SAMSAT BERGERAK |            |                 |                  |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|
| NO.                    | TAMBAH     | WAKTU PELAYANAN | KETERANGAN LUBUK |
| 1.                     | SEKUPANG   | 10.00 - 12.00   | 10.00 - 12.00    |
| 2.                     | BENGKONG   | 12.00 - 14.00   | 12.00 - 14.00    |
| 3.                     | SEL. BEDUK | 14.00 - 16.00   | 14.00 - 16.00    |
| 4.                     | NONGSA     | 16.00 - 18.00   | 16.00 - 18.00    |

  

| JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU |            |                 |                  |
|---------------------------|------------|-----------------|------------------|
| NO.                       | TAMBAH     | WAKTU PELAYANAN | KETERANGAN LUBUK |
| 1.                        | SEKUPANG   | 10.00 - 12.00   | 10.00 - 12.00    |
| 2.                        | BENGKONG   | 12.00 - 14.00   | 12.00 - 14.00    |
| 3.                        | SEL. BEDUK | 14.00 - 16.00   | 14.00 - 16.00    |
| 4.                        | NONGSA     | 16.00 - 18.00   | 16.00 - 18.00    |

# BP-Pemko Sepakat Perkuat Daya Saing Batam

## Bangun Infrastruktur dan Selesaikan Persoalan Lahan

ADIANSYAH, Lubukbaja

**P**EMBUKAAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019,

jadi arena Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk menyampaikan rencana pengembangan Batam ke depan.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, kehadirannya dalam pembukaan musrenbang merupakan agenda penting karena erat kaitannya dengan sinergisitas program antarlembaga yang ada di Batam.

"Ini acara yang penting untuk

Baca BP... Hal 13

Dua mesin untuk gerakan dua kapal. Kita bisa saling memperkuat, anggaran yang dimiliki keduanya bisa disinergikan untuk mempercepat pembangunan Kota Batam."

LUKITA DINARSYAH TUWO  
Kepala BP Batam

## Pemko Ancam Persulit Izin Publik

### Pedagang yang Jual Komoditas Pangan di Atas HET

**BATAM KOTA (BP)** - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan memberi sanksi tegas kepada pedagang nakal yang

menjual komoditas pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sanksi tegas itu bisa berupa mempersulit izin publik yang nantinya akan diurus para pedagang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi men-

gatakan, pihaknya masih mensurvei harga 24 item komoditas pokok. Di antara 24 item itu, ada harga daging sapi beku yang harusnya dijual Rp 80 ribu per kilogram (kg) sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

"Tim saya sudah turun

untuk mengecek harga-harga di pasar. Satu tim terdiri dua sampai empat orang yang turun ke dua sampai tiga pasar," kata Zaref usai menghadiri rapat Paripurna Istimewa di Kantor DPRD Batam, Selasa (20/3) lalu.

Baca PEMKO... Hal 11

## TERAS

## DPRD Desak Direksi BUMD Diganti

**BATAM KOTA (BP)** - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto minta Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera melakukan pergantian pimpinan dan direksi PT Pembangunan, perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam. "Kami rekomendasikan ini (direksi BUMD Batam diganti)," kata Nuryanto pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam di Hotel Vista, Rabu (21/3).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur ini, rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan. Karena merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 tentang BUMD Batam, tepatnya pada pasal 12 disebutkan masa jabatan direksi perseroan paling

Baca DPRD... Hal 13



Zarefriadi

F. DALLI HARAHAP/BATAM POS

## Bangunan Tepi Jalan Seipanas-Bengkong Dibongkar

**BATAM KOTA (BP)** - Hari ini, Kamis (22/3) Tim Terpadu Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menertibkan ratusan bangunan yang ada di sepanjang jalan Seipanas-Bengkong Seken. Kepala Bidang Ketenteraman dan Kertertiban Umum Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan, penertiban hari ini dimulai dengan sisi kiri jalan atau dari arah Seipanas ke Bengkong Seken.

la menyebutkan, total bangunan secara keseluruhan sebanyak 400 lebih. Hampir 80 persen bangunan sudah dibongkar sendiri pemiliknya. "Paling ada 87 bangunan yang akan kami bongkar, sedangkan lainnya sisa-sisa bekas yang dirapikan oleh pemiliknya," kata dia usai menghadiri Musrenbang tingkat Kota Batam,



K. CEDEF MULYANA/BATAM POS

Rabu (21/3).

Imam menjelaskan dari Tim Terpadu ada 250 personel yang akan turun untuk menertibkan bangunan tersebut. "Penerbitan ada dua tahap, besok

(hari ini, red) untuk bangunan yang berdiri di sepanjang jalan Seipanas menuju Bengkong Seken. Nanti akan dilanjutkan tanggal 28 Maret 2018 untuk sebelah lainnya," terangnya.

Sementara itu, Camat Bengkong M Tahir mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan terdapat 313 ruko dan

Baca BANGUNAN... Hal 13

## TAKE "YOUR PARTNER IN CONSTRUCTIONS"



• NAGAYA: PT. TAKEO JAYA INDONESIA  
Kemp. Windsor Central Blok A No. 17  
(Belakang Rumah Makan Sedayana)  
Telp. 0776-4582890, HP: 0811 7167 197

• TANJUNG UNGANG  
CIPTA PRIMA SUPERMARKET MATERIAL  
Jl. Brigen Katambo (Siderang Tunas Rageng)  
HP: 0822 3476 6633

• BATU AJI: PT. HARAPAN SRI JAYA  
Kemp. Sentosa Puri Blok E No. 1 & 2  
HP: 0813 488 8811, 0852 7191 0888

# DPRD Desak Direksi BUMD Diganti

Sambungan dari hal 9

lama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali dalam satu kali jabatan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

"Ini sudah 10 tahun lebih, mau 15 tahun. Padahal ada aturannya," ucapnya.

Mengacu pada Perda itu, sambungnya, sudah keharusan pergantian direksi BUMD Batam dijalankan. Apalagi, peran BUMD Batam tidak produktif dan tidak maksimal sesuai harapan. "Seolah-olah ini maunya saya. Lho perdanya ada. Bukan masalah tidak suka pada orang, ada aturannya. Ini (pergantian) tergantung Pak Wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) lah kapan digantinya," paparnya.

Ia mengatakan, filosofi pendirian BUMD Batam pada awalnya selain sebagai kebutuhan daerah juga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi, kini peran BUMD Batam masih jauh dari harapan. "Makanya kami minta ke depan BUMD Batam dioptimalkan kinerjanya dan dimulai dengan pergantian direksinya," tegasnya.

Menurut Cak Nur, DPRD Batam mendukung sepenuhnya upaya Pemko Batam mengendalikan harga bahan

pokok, mengingat Batam bukan daerah penghasil. Apalagi, keberhasilan penekanan harga dinilai akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan inflasi. Kenyataannya sekarang, masyarakat kerap mengeluhkan harga bahan pokok yang tinggi dan persediaan terbatas.

"Nah ini, kalau BUMD-nya sehat dan bisa ambil peran, ini (masalah harga kebutuhan pokok dan persediaan) mestinya BUMD bisa berperan. Ini sekarang hanya dapat *fee* dari gas," sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Muhammad Rudi mengaku telah lama mencari sosok pengganti pimpinan BUMD Batam. Namun tawarannya tidak bersambut. "Tak ada yang mau, padahal sudah saya tawarkan. Kalau ada yang mau saya kasih (jabatan di BUMD)," ucap Rudi.

Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Batam hingga kini belum digelar. Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta agar sebelum RUPS digelar perlu ada audit keuangan BUMD Batam. "Pak Wali (Wali Kota Batam) meminta audit dulu oleh akuntan publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin.

Jefridin mengatakan, periode komisaris dan direktur BUMD Batam akan berakhir Mei mendatang. Untuk itu, RUPS merupakan keharusan untuk dilakukan. "Makanya kami tunggu hasil audit dulu, baru RUPS," ujarnya. Seiring dengan ini, ia mengatakan evaluasi akan dilakukan setelah RUPS. Menurutnya audit juga diperlukan untuk bahan laporan keuangan BUMD Batam.

Terpisah, Direktur PT Pembangunan BUMD Batam Hari Basuki mengaku telah menjabat 15 tahun. Namun, menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2002 adalah perda tentang pembentukan BUMD Batam dengan nama PT Pembangunan Kota Batam yang dalam praktiknya berbentuk perseroan terbatas harus tunduk pada Undang-Undang perseroan Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam aturan tersebut diatur kekuasaan tertinggi adalah RUPS pemegang saham.

"Intinya tergantung RUPS pemegang saham, kapanpun boleh. Sekarang ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2017 juga diperbolehkan jabatan tiga periode dan kalau usaha khusus boleh diangkat kembali sesuai RUPS," sebutnya. (adi)

## Bagunan Tepi Jalan Seipanas-Bengkong...

Sambungan dari hal 9

kios yang ada di sepanjang jalur Seipanas-Bengkong Seken. Rinciannya yaitu 66 bangunan di Kelurahan Bengkong Laut, 135 bangunan di Bengkong Indah, dan 106 bangunan di Seipanas.

"Yang dikasih SP ada 350, yang sudah dibongkar 150. Mayoritas bangunan tambahan. Kalau bangunan besar jenis ruko tidak ada yang kena, paling pagar atau halaman. Tempat ibadah, puskesmas, sekolah juga pagarnya yang kena, sekitar satu meter," sebut Tahir.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam Yumasnur mengungkapkan penertiban ini merupakan tahap lanjutan untuk mendukung kelancaran pelebaran jalan dari Simpang Kuda menuju Bengkong Seken.

Sesuai dengan rencana saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses lelang dan Mei akan dimulai pengerjaannya. Ia menyebutkan jalan Simpang Kuda menuju Bengkong Seken nantinya akan dilebarkan menjadi empat lajur. "Dua (lajur) kiri dan dua di kanan," sebutnya.

### Pemilik Kedai Pasrah

Sejumlah pemilik bangunan di kawasan Bengkong pasrah atas penertiban yang akan dilakukan Tim Terpadu hari ini. Hal itu dikarenakan pihaknya sudah menerima surat peringatan (SP) 3 hingga surat pembongkaran.

Mawan, salah satu pemilik kios di kawasan Bengkong Indah sudah membongkar kedai miliknya seminggu lalu. Karena dibongkar sendiri, dirinya masih bisa menyelamatkan kaca hingga atap dari kedai yang dia bangun. "Kalau tak saya bongkar, takutnya merusak ke bangunan bagian belakang. Makanya milih bongkar daripada dibongkar paksa besok (hari ini, red)," terang pria 40 tahun ini.

Dia mengaku pasrah lahan yang telah ia tempati belasan tahun tersebut dibangun jalan. Apalagi status tanah merupakan milik pemerintah. "Ya pasrahlah, ikut saja apa kata pemerintah, selagi itu untuk kepentingan bersama. Kasihan aja sama bangunan berbentuk ruko," kata Mawan.

Pantauan Batam Pos, puluhan kedai yang berada di pinggir jalan antara Simpang Kuda hingga Simpang Jalan Bengkong Lama sudah banyak dibongkar. Pembongkaran kedai pun sudah terlihat dari bulan lalu hingga kemarin.

### Camat Minta Bongkar Kios Liar

Sementara itu, Camat Batuaji Ridwan mengaku sudah mengirim surat pembongkaran kios liar di sekitar Pasar Seken Aviari kepada Satpol PP. Harapannya, pihak Satpol PP langsung merespons dengan melakukan penertiban. "Kita sudah mengirimkan surat ke Satpol PP secara resmi. Artinya, kita minta agar kios liar itu

dibongkar," katanya kemarin.

Ridwan mengaku, sebelum mengirimkan surat ke Satpol PP, pihaknya sudah meminta pihak pengelola atau pemilik kios liar untuk menghentikan pembangunan kios liar tersebut. Tetapi surat tersebut tak mereka direspons. "Itu awalnya kan bekas kebakaran. Dan jelas itu tanah milik negara dan Ruang Terbuka Hijau. Kita sudah minta jangan dibangun, tetapi mereka bersikeras," katanya.

Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Batam Imam Tohari membantah pernyataan Ridwan. Menurutnya, pihak Satpol PP sama sekali belum menerima surat dari Kecamatan Batuaji terkait kios liar di Pasar Seken Aviari. "Belum ada kami terima surat sama sekali dari kecamatan. Jadi apa yang dibilang Pak Camat itu tak benar," katanya.

Meski demikian, ia mengaku akan langsung melakukan penertiban itu kalau sudah menerima surat tersebut. "Kalau memang sudah ada suratnya, kita akan langsung bongkar. Kita tunggu saja," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Batam Harmidi meminta Camat dan Satpol PP harus berkoordinasi dengan baik. Ia berharap kios liar, apalagi pembangunan baru untuk dihentikan. "Camat dan Satpol PP harus tegas. Kalau ini dibiarkan maka akan semakin banyak nantinya orang yang bangun kios liar di RTH," ucapnya. (yui/she/ian)

# Tak Masuk Akal Gaji Honorer RSUD Telat

**BATAM KOTA (BP)** - Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihalohe mengatakan, sangat tak masuk akal gaji honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah terlambat dibayarkan, khususnya bulan Desember 2017. Pasalnya, pagu anggaran untuk rumah sakit tersebut tahun lalu mencapai Rp 102,6 miliar. "Dari pagu anggaran itu, ada Rp 38,9 miliar untuk belanja tak langsung. Di dalamnya ada untuk gaji pegawai honorer," ungkap Udin, Rabu (21/3).



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

**Udin P Sihalohe**

Menurut dia, persoalan sebenarnya bukan hanya masalah gaji. Pihaknya melihat sendiri bagaimana terganggunya pelayanan publik di RSUD dengan ketiadaan obat di sana beberapa waktu lalu. "Begitu juga keengganan dokter spesialis yang bekerja di sana karena insentifnya juga belum dibayar atau masih terutang juga," ujar anggota politikus PDIP ini.

Udin meminta agar laporan keuangan di RSUD Embung Fatimah dibuka selebar-lebarnya agar masyarakat mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi rumah sakit pelat merah tersebut. "Buka semuanya agar kendala-kendala itu bisa terurai dan kami bisa mencari solusi," ujarnya.

Kalau tetap tertutup seperti saat ini, ia melanjutkan, pihaknya tak tahu kesulitan pasti yang dialami RSUD Batam ini. "Kalau memang terjadi pelanggaran di sana, ya harus ada tindakan dari aparat penegak hukum, demi sehatnya kembali manajemen RSUD Batam," terang Udin.

Terkait adanya pemeriksaan atau audit di RSUD yang diklaim jadi penyebab terlambatnya pembayaran gaji pegawai honorer sesuai alasan pihak RSUD selama ini, menurut Udin hal itu tak bisa dijadikan alasan dan sangat tak bisa diterima.

"Kalau itu dijadikan alasan, bagaimana dengan tahun sebelumnya, apakah hanya karena pemeriksaan, maka tiap tahun harus terjadi keterlambatan pembayaran gaji. Saya menduga justru karena ada penyimpangan keuangan atau pengeluaran keuangan di RSUD Batam, maka keterlambatan gaji pegawai itu terjadi," katanya. (gas)

# Permintaan Tinggi, Harga Murah

## Dewan Minta Tim Khusus Awasi Tambang Pasir Ilegal

EUSEBIUS SARA-ALFIAN  
LUMBAN GAOL, Sagulung

**TINGINYA** permintaan pasir di Batam menjadi pemicu maraknya tambang pasir darat ilegal di sekitar Dam Tembesi, Sagulung, maupun di lokasi lainnya di Batam.

Penelusuran *Batam Pos* pada sejumlah toko material bahan bangunan di wilayah Batuaji dan Sagulung terungkap, umumnya toko-toko tersebut menampung pasir yang didatangkan dari lokasi tambang pasir darat di Batam. Harga pasir darat di Batam lebih murah dibanding pasir yang didatangkan dari luar Batam.

Sejumlah pemilik toko material di Batuaji menyebutkan selisih harga jual antara pasir darat dari tambang ilegal di Batam dengan pasir legal yang didatangkan dari luar Batam mencapai Rp 1 juta per truknya.

Pasir dari luar Batam dibeli seharga Rp 1,8 juta per truk, sementara pasir dari lokasi tambang ilegal di Batam hanya Rp 850 ribu. Harga jual eceran pun jauh berbeda. Pemilik toko material menjual pasir tambang Batam Rp 1,05 juta per truk, sedangkan pasir dari luar Batam di atas Rp 2 juta per truk.

"Beda kualitasnya. Pasir dari Batam tak bersih betul. Masih ada campur tanah dan lumpur. Kalau dari luar memang bagus, benar-benar pasir untuk bangunan. Makanya jauh lebih mahal yang dari luar sama yang dari Batam sini," ujar Andi, seorang pemilik toko bangunan di Batuaji, Rabu (21/3).

Karena harga jual lebih murah itulah, pasir hasil tambang ilegal di Batam laku keras. Pe-



WARGA melihat salah satu mesin penyedot pasir milik penambang di dekat Dam Tembesi, Sagulung, Selasa (20/3) lalu. DPRD Kepri meminta BP Batam dan Distamben Kepri membentuk tim khusus untuk mengawasi penambangan pasir ilegal di Batam.

milik toko material cenderung menjual pasir ilegal itu ke timbangan pasir dari luar Batam. "Mana yang laku itulah yang kami jual. Biasalah, prinsip usaha dagang memang seperti itu," ujar Andi. Tingginya permintaan warga itulah yang memicu maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam.

Di wilayah Batuaji dan Sagulung, penambangan pasir darat ilegal itu terjadi di sekitaran Dam Tembesi. Lahan perbukitan yang menjadi perbatasan dam kini sudah berubah jadi

lembah dan ngarai. Aktivitas tambang pasir dengan alat bantu mesin penyedot pasir itu telah meratakan bukit-bukit yang ada di sana.

Penertiban oleh pihak Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam beberapa waktu lalu tak berdampak apapun. Aktivitas tambang bahkan kian mendekati permukiman warga di Tembesi.

Bentuk Tim Khusus  
DPRD Provinsi Kepri me-

mintanya BP Batam bekerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri membentuk tim khusus mengawasi tambang pasir ilegal di Batam. Ini akan meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan di Batam. "Tim khusus ini penting. Ini satu-satunya cara untuk mengatasi dan meminimalisir tambang pasir ilegal ini," kata anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov.

Di dalam tim ini, bisa dimasukkan pihak penegak hukum

lainnya. Asalkan, rutin berpatroli tiap harinya.

Menurut Ruslan, kalau dengan cara ini masih ada penambang, berarti patut dicurigai ada pihak-pihak yang bermain. Di sinilah kehadiran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan perindakan.

"PPNS jangan diam saja. Dan setahu saya belum ada selama ini yang diperiksa terkait tambang pasir ilegal ini. Padahal tambang pasir ilegal sudah belasan tahun beroperasi di Batam," katanya. \*\*\*

### Drainase Induk

### Kampan Laut Kepri

# Drainase Induk Seibeduk Dinormalisasi

**SEIBEDUK (BP)** - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) bersama Balai Sungai Wilayah IV (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pengerjaan perbaikan drainase induk di Seibeduk. "Tahun ini sudah mulai pengerjaannya," kata Kepala DBMSDA Kota Batam Yumasnur, Rabu (21/3).

Ia menjelaskan, pelebaran drainase tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan dikerjakan. Pengerjaan dilakukan secara bertahap. Tahun ini dimulai dengan tahap normalisasi. Berikutnya, dilanjutkan dengan bangunan fisik.

Yumasnur menyebutkan, nantinya drainase akan dilebarkan menjadi 30 meter. Untuk perluasan drainase ini sudah dimulai dari tahun sebelumnya, termasuk lahan yang akan digunakan untuk pelebaran. "Semua sudah oke dan tak ada masalah. Jadi tahun ini sudah mulai ada pengerjaan oleh BWS IV," sebutnya.

Ia menambahkan, seluruh drainase yang ada di Batam

akan dinormalisasi. Saat ini, alat yang dimiliki oleh DBMSDA turun ke drainase yang tersebar di Batam. "Kami juga koordinasi dengan camat setempat," ujarnya.

Mengenai proyek prioritas di tahun depan, Yumasnur menyebutkan semuanya masih dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Batam. "Nanti kami lihat yang mana saja yang prioritas tentu akan diutamakan, terutama pengentasan permasalahan banjir melalui pembangunan dan perbaikan drainase," terangnya.

Termasuk, drainase yang ada di Legenda Bali. Ini menjadi salah satu prioritas karena sudah beberapa kali diusulkan di musrenbang. "Ini lagi dibahas juga. Jika keadaan sudah sangat mendesak akan kami kerjakan tahun depan," tambahnya.

Banjir merupakan salah satu persoalan warga yang harus diselesaikan tahun ini. "Untuk jumlahnya masih kami bahas sesuai anggarannya," tutupnya. (yui)

# Pemko Ancam Persulit Izin Publik

*Sambungan dari hal 9*

Hasil dari survei tim Disperindag tersebut nantinya akan dirilis beberapa hari ke depan. Sebab, survei yang dilakukan untuk beberapa pasar, termasuk retail modern. "Hasilnya nanti setelah dirangkum semua. Sebenarnya tim ini sudah rutin turun, namun karena ada gejolak harga daging, saya minta lebih teliti untuk mensurvei," ungkapnya.

Menurutnya, survei juga sebagai salah satu cara mengontrol harga-harga di pasaran. Dimana jika terdapat harga melebihi HET, maka pihaknya akan memberi teguran kepada para pedagang. Jika minggu depan harga tak

juga berubah, maka akan ada teguran lanjutan hingga pembinaan.

"Jika sudah beberapa kali kami tegur namun tak juga ada perubahan, maka pedagang itu akan kami bina. Tak berubah juga, maka ke depannya mereka akan dipersulit saat pengurusan izin publik. Apalagi setiap pedagang itu diwajibkan memiliki izin, jika tidak mereka ilegal," jelasnya.

Disinggung penyebab tingginya harga daging sapi beku, Zaref pun belum bisa menjelaskan secara pasti. Namun menurutnya, dari distributor harga yang diberikan kepada pedagang sudah di bawah HET. Artinya, pedagang bisa menjual sesuai HET.

"Kami sudah tanya ketiga

distributor daging, mereka pastikan harga di bawah HET. Jadi intinya sekarang bukan dari distributor, tapi memang dari pedagang sendiri," ujar Zaref.

Bahkan, Zaref memastikan kuota daging untuk Batam aman dan tak kekurangan. Terkait harga yang tinggi di retail modern, Zaref beralasan jenis daging yang dijual berbeda dengan daging sapi beku biasa. Karena itu harga di retail modern itu bisa tinggi.

"Jenis dan kualitas dagingnya berbeda, makanya harga di sana lebih tinggi. Jadi bukan termasuk kategori daging sapi beku. Sebab kalau daging sapi beku wajib HET Rp 80 ribu," pungkas Zaref. **(she)**

# BP Serahkan 669 Ruas Jalan ke Pemko

**BATAM KOTA (BP)** - Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) atau nota perjanjian pinjam pakai aset jalan di Kota Batam di Hotel Vista, Rabu (21/3).

Dalam nota perjanjian tersebut, disepakati 669 ruas jalan di Kota Batam dipinjam-pakaikan oleh BP Batam kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Masa pinjam pakai jalan tersebut akan berlangsung lima tahun sambil melakukan tindak lanjut untuk proses pemakaian selanjutnya.

Penandatanganan MoU tersebut dalam upaya mewujudkan kelancaran mobilitas barang dan orang di dalam kawasan perdagangan bebas dan pela-

buhan bebas Batam. Di samping itu, juga untuk meningkatkan citra dan daya saing Kota Batam sebagai destinasi pariwisata dan investasi.

"Jadi diperlukan berbagai usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dengan dukungan berbagai sumber dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih ada aset lain yang masih diproses agar di kelola oleh Pemko Batam untuk mendukung kebutuhan masyarakat Kota Batam," kata Lukita.

BP Batam, kata dia, akan fokus untuk menggerakkan perekonomian di Kota Batam. Selain itu, BP Batam juga akan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan legalitas

# BP Serahkan 669 Ruas Jalan ke Pemko

*Sambungan dari hal 9*

lahan, terutama lahan Kampung Tua. "Bersama Wali Kota kami akan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan," sebut Lukita lagi.

Sementara itu, Wali Kota Muhammad Rudi mengatakan, Pemko akan menindaklanjuti aset-aset lainnya yang akan diserahkan BP Batam. Termasuk aset Pasar Induk Jodoh.

Menurut Rudi, persetujuan penyerahan aset ke Pemko Batam sudah ditandatangani. Namun, dia berharap pengelolaan Pasar Induk oleh Pemko juga bisa dilakukan dengan MoU, seperti pinjam pakai jalan.

Diakui Rudi, butuh proses untuk penyerahan aset tersebut, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkue) sampai Presiden. "Ini penting untuk legalitas. Tadi (kemarin) saya juga sudah sampaikan kepada Pak Lukita agar tiap-

tiap kecamatan memiliki pasar. Ini perlu untuk membangkitkan perekonomian masyarakat ini," tuturnya.

Terdapat enam aset yang diserahkan dari BP Batam ke Pemko Batam. Yakni Masjid Raya Batam, Masjid Baiturrahman di Sekupang, Pasar Induk Jodoh, Kantor DPRD Kota Batam, Kantor Wali Kota Batam, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur.

## **Siapkan Lahan Pasar**

BP berjanji akan menyelaraskan misi pembangunan ekonomi 2019 dengan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Secara detail, Kepala BP Batam Lukita Dinar-syah Tuwo mengungkapkan BP Batam akan membantu tugas Pemko dalam menata Kota Batam agar menjadi lebih rapi dan indah. Sehingga mampu mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani.

"Sinkronisasi pembangunan antara BP dan Pemko tentu

lewat penyerahan aset jalan, sehingga Pemko bisa melakukan pembangunan dan perbaikan tanpa harus menunggu legalitas," kata Lukita di Gedung Marketing BP Batam, kemarin.

Kemudian penyerahan aset Pasar Induk Jodoh akan segera dilakukan secepatnya. BP Batam juga siap mengalokasikan lahan di setiap kecamatan untuk dibangun pasar. BP Batam berharap dengan keberadaan pasar di sentero Batam dapat menekan biaya komoditas pokok.

"Kita akan lihat lahan-lahan yang tersedia, supaya setiap kecamatan tersedia pasar-pasar. Sehingga bisa tekan biaya kebutuhan pokok. Saya sangat menyambut rencana ini dan secepatnya akan dikoordinasikan," paparnya.

Selanjutnya adalah persoalan drainase dan kolam retensi. BP akan mencoba memetakan keseluruhan drainase dan kebutuhan kolam retensi di seluruh penjuru Batam. "Drainase ini penting

karena menyangkut banjir yang sering terjadi di Batam. Makanya kami harus duduk bersama dulu," ungkapnya.

Berikutnya adalah tentang lahan untuk pemakaman. "Untuk makam, saya katakan akan komitmen untuk hal-hal yang perlu dan dibutuhkan dulu. Jadi tidak secepatnya disediakan," janjinya.

Dan persoalan terakhir yang akan diupayakan untuk diselesaikan adalah persoalan relokasi penduduk dari lahan Baloi Kolam. "Ada sejumlah kerja sama yang sudah dilakukan bersama wali kota. Contoh soal Kampung Tua dan Baloi," ungkapnya.

Disebutkannya, akan ada tujuh titik yang dijadikan sebagai lokasi baru bagi warga pindahan Baloi Kolam. "Titik-titik tersebut antara lain ada di Nongsa, Kabil, Tanjungpiayu, dan lainnya. Yang penting lokasinya dulu dan lokasinya layak, tidak di atas tebing tapi akan kami berikan lokasi lahan yang datar," pungkasnya. **(adi/leo)**

# BP-Pemko Sepakat Perkuat Daya Saing Batam

DE

Sambungan dari hal 9

2019. Mudah-mudahan kita bisa ciptakan suasana yang kondusif dan baik di Batam," ujarnya.

Ia mengatakan, BP Batam berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan Pemko Batam. Menurutnya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sekaligus daerah otonomi memiliki kelebihan dibanding daerah lain. Kehadiran BP Batam dan Pemko Batam dalam pembangunan dinilai dapat mendatangkan nilai yang baik bagi Batam jika dilaksanakan dengan sinergisitas yang baik.

"Dua mesin untuk gerakkan dua kapal. Kita bisa saling memperkuat, anggaran yang dimiliki keduanya bisa disinergikan untuk percepat pembangunan Kota Batam," sebut Lukita.

Ia mengungkapkan, BP Batam hadir dengan visi dan misi yang difokuskan terkait ekonomi dan industri, lembaga yang ia pimpin ditugaskan untuk memastikan sektor tersebut terus tumbuh di samping sektor perdagangan. Batam sebagai pusat logistik juga pariwisata juga ditingkatkan. "Sektor industri dan dagang sudah duluan berkembang, ini jadi sumber kita hidup selama ini," katanya.

Namun seiring tren ekonomi global yang terganggu, Batam juga kena imbas terutama sektor galangan kapal dan migas yang berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Ini fakta yang kita lihat," ucapnya.

Namun melihat perkembangan kekinian ekonomi global, kini ekonomi digital dan pariwisata punya potensi besar. Batam dengan posisinya yang strategis dapat memanfaatkan sektor tersebut sebagai andalan ekonomi baru. Bahkan negara-negara tetangga juga sekarang menjemput hal tersebut dengan membangun destinasi wisata.

"Kita masih punya fasilitas yang baik, punya lokasi strategis berada di ujung Selat Malaka, setiap bulan pelayaran tinggi. Kita harus tangkap kesempatan ini, Batam akan jadi pusat logistik, bersamaan dengannya pengembangan ekonomi digital yang disebut Presiden Joko Widodo punya potensi 130 miliar dolar Amerika," ungkapnya.

Dengan alasan itu, menurut Lukita, perlu ada sinergi yang baik antarpemangku kebijakan di Batam. Terutama antara BP dan Pemko Batam dengan sama mengembangkan potensi yang kini tersedia. "Kami ingin BP dan Pemko bahu membahu ke arah sana, tanpa kita tinggalkan industri yang ada karena masih punya potensi untuk bangkit. Migas mulai bergerak, kapal masih bisa dorong. Ini perlu kita bersama, tak bisa sendiri-sendiri," terangnya.

Selain itu, soal infrastruktur, BP Batam kini tengah

mengembangkan terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam. Menurutnya bandara tersebut akan ditingkatkan kapasitasnya, tak hanya terkait penumpang namun akan jadi pusat kargo dan juga *maintenance* pesawat. Di samping itu, BP sedang mengembangkan Pelabuhan Batuampar untuk mendukung kegiatan logistik di Batam.

"Kami juga mendukung pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh. Dan juga dukung inisiatif Gubernur Kepri Nurdin Basirun soal Jembatan Batam Bintan (Babin). Kalau infrastruktur bagus orang akan ke Batam," ucapnya.

Masih menurut Lukita, kehadiran Jembatan Babin diperlukan untuk memperlancar kegiatan ekonomi, juga karena lahan di Batam terbatas. Hal ini berbeda dengan daerah lain, seperti Jakarta yang jika penduduknya padat di Jakarta akan tinggal di daerah di sekitarnya. "Maka perlu dukung Jembatan Babin, harus kita dorong pemerintah pusat agar segera jembatan ini dibangun. Ke depan, pekerja kita bisa tinggal di Bintan bekerja di Batam, Bintan areanya masih luas," jelasnya.

Untuk itu, sambungnya, akan terus ada upaya mengintegrasikan daerah-daerah di Batam juga dengan daerah lain di sekitar Batam. Dalam hal transportasi, tiga tahun ke depan pihaknya ingin mengembangkan LRT untuk menghubungkan area penting di Batam. "Pusat datang dan pergi akan terintegrasi baik di bandara maupun pelabuhan. Pembangunan pengolahan limbah rumah tangga terus kami kembangkan juga," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, sejatinya kehadiran Pemko Batam dan BP Batam untuk mensejahterakan rakyat. Maka itu, senada dengan Lukita, menurut Rudi, pengembangan Batam harus dilakukan bersama. "Ingin bangun Batam harus ikhlas, semua akan selesai. Saya dipilih rakyat agar masyarakat sejahtera. Kepala BP diangkat pemerintah pusat juga untuk kesejahteraan," katanya.

Ia menyampaikan, fokus pembangunan di 2019 masih berkisar pada infrastruktur. Hal ini dipersiapkan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang diharapkan jadi andalan baru ekonomi Batam. "Kejar pariwisata agar cepat. Batam bagian Timur selesai 2019 akhir. Jalan *ring road* dari Jodoh sampai Tiban I kita akan buka juga," sebutnya.

Menurut Rudi, dalam dua tahun kepemimpinannya bersama Amsakar Achmad telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi Batam. Fokus utama membenahi infrastruktur yang telah dilakukan di beberapa kawasan. Beberapa ruas jalan telah diperlebar dan dilengkapi fasilitas pejalan

kaki, taman, serta lampu hias. Kawasan Nagoya-Jodoh salah satu contohnya, terlihat lebih indah.

Kemudian penataan dilanjutkan hingga ke wilayah Batamcenter. Pengembangan infrastruktur sampai ke kelurahan melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Daerah *hinterland* juga tak lepas dari program pengembangan infrastruktur.

"Pada 2019 direncanakan pembangunan jalan akan terus dikembangkan ke wilayah Sekupang, Seibeduk hingga Sagulung dan Batuaji," jelasnya.

Dengan demikian, diharapkan pada 2020 masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Batam dapat menikmati Batam yang lebih tertata secara merata. Sehingga dapat mengurangi kemacetan, memberikan kenyamanan bagi pengendara maupun pejalan kaki, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aktivitas perekonomian di Batam.

Di samping pembenahan infrastruktur, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi poin yang juga sangat penting. Sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan anak, menjadi program yang harus terus ditingkatkan.

"Penanganan kawasan banjir juga masih menjadi perhatian, pelebaran drainase secara permanen terus dilakukan. Sistem transportasi publik juga tidak luput dari perhatian kami. Saat ini terdapat delapan koridor yang telah dilayani oleh bus Tras Batam dengan jumlah kendaraan 72 unit," terangnya. Sementara dari segi pengelolaan keuangan, pihaknya bertekad untuk mengunci potensi *lose* dengan menerapkan sistem elektronik dalam pengelolannya.

## Lahan Jadi Persoalan Utama

Sementara itu, permasalahan utama pengembangan Batam oleh Pemko Batam adalah persoalan lahan. Menurut Wali Kota Muhammad Rudi, uang negara harus dipakai untuk aset yang dikelola lembaga tertentu. Namun yang terjadi di Batam karena lahan kewenangan di BP Batam hal tersebut jadi persoalan tersendiri. Untuk itu, ia meminta pada BP Batam untuk menyerahkan aset tertentu pada lembaga tertentu yang menggunakan aset atau lahan.

"Maka ini PR Pak Lukita, besar ini. Kalau boleh jangan hanya ke Pemko saja yang diserahkan. Polda juga serahkan, TNI serahkan, semua diserahkan supaya tuntas," kata dia.

Khusus untuk Pemko Batam, di dalam RPJMSD telah diperhitungkan kebutuhan lahan selama 5 tahun, yaitu sebanyak 444 persil untuk berbagai pembangunan fasilitas Pemko dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

"Makin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan dan tidak adanya kewenangan pengelolaan lahan bagi Pemko merupakan masalah yang harus dipecahkan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi menyampaikan langsung ke Kepala BP Batam Lukita akan kebutuhan lahan untuk membangun sarana masyarakat seperti lahan untuk pasar serta pemakaman.

## 15 Ribu Usulan untuk Tahun 2019

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Batam merekapitulasi 15.823 usulan untuk kegiatan 2019. Besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh usulan itu mencapai Rp 5,797 triliun.

Kepala Bapelitbang Kota Batam Wan Darussalam mengatakan, usulan itu berasal dari verifikasi masyarakat, rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Batam. "Rekapitulasi ini merupakan hasil pengumpulan data dari masyarakat ke pemerintah dengan sistem *bottom up* melalui musrenbang," kata Wan dalam Pembukaan Musrenbang tingkat Kota Batam di Crown Vista, kemarin.

Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dan terkumpul total 3.278 usulan dengan kebutuhan anggaran Rp 2,701 triliun yang terdiri dari 1.432 usulan Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) bernilai Rp 179,8 miliar dan usulan non PIK sebanyak 1.846 kegiatan dengan anggaran Rp 2,521 triliun.

"Kalaulah ini saja diterima, habis APBD Batam. Maka dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas di tingkat kecamatan. Di musrenbang kecamatan betul-betul terjadi pengerucutan terhadap usulan," ujarnya.

Pada tingkat kecamatan usulan PIK mengerucut menjadi 1.408 kegiatan dengan nilai Rp 176 miliar. Sedangkan kegiatan non-PIK berkurang hingga 641 usulan bernilai Rp 1,360 triliun. Total di tingkat kecamatan terekapitulasi 2.049 usulan dengan anggaran Rp 1,536 triliun. "Dari *e-planning* Pokir dewan, masing-masing anggota dewan memasukkan 18-20 usulan. Yang masuk sampai ditutup, sebanyak 907 usulan dengan anggaran Rp 616,7 miliar," katanya.

Pembahasan di Forum OPD, lanjut dia, ada 15.823 usulan dengan anggaran Rp 5,797 triliun. Kemudian dilakukan sinkronisasi dari usulan masyarakat, rencana OPD, dan Pokir DPRD Batam menjadi Rp 4,085 triliun, dan rasionalisasi kegiatan menjadi Rp 3 triliun.

"Adapun ancap-ancang anggaran 2019 yakni Rp 3 triliun dengan komposisi 30 persen atau Rp 900 miliar belanja tidak langsung dan 70 persen atau Rp 2,1 triliun untuk belanja langsung atau belanja modal," katanya.\*\*\*